

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

121

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 19

TAHUN 2007

AKSI KORPORASI

Elnusa Akan Tawarkan 20 Persen Saham ke Publik

JAKARTA, KOMPAS – PT Elnusa, anak perusahaan Pertamina, akan melepas 20 persen sahamnya kepada publik. Penawaran saham perdana atau *initial public offering* ditargetkan bisa dilakukan sebelum akhir tahun 2007 atau awal 2008.

Sekretaris Perusahaan PT Elnusa Haris Syahrudin, Selasa (17/7), mengemukakan bahwa rencana itu telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan yang dilaksanakan Senin malam.

Komposisi kepemilikan saham Elnusa terdiri dari PT Pertamina 51,38 persen, PT Tri Daya Esta 46,44 persen, PT Danareksa Daiwa NIF Ventures 1,94 persen, karyawan PT Elnusa 0,15 persen, Yayasan Hari Tua 0,07 persen, dan Koperasi Karyawan Elnusa 0,01 persen.

"Jumlah saham yang akan ditawarkan ke publik sebesar 20 persen dengan nilai mencapai 30 juta dollar AS," ujar Haris.

Menurut Haris, bulan depan Elnusa akan menunjuk penjamin emisi untuk IPO tersebut.

Dana yang berhasil dihimpun dari hasil IPO itu akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan menambah peralatan seismik dan pengeboran.

Tahun 2006, Elnusa berhasil membukukan keuntungan bersih Rp 82 miliar, sementara tahun 2005 meraih keuntungan sebesar Rp 74 miliar.

Kegiatan usaha Elnusa mencakup bisnis penyedia jasa pendukung pengeboran minyak dan gas, usaha eksplorasi dan eksploitasi migas, serta jasa informasi teknologi.

Dari ketiga bidang usaha itu, pekerjaan jasa penunjang migas memberikan kontribusi sekitar 48 persen dari seluruh pendapatan Elnusa.

Elnusa, yang sempat mengembangkan bisnis di hilir migas dengan membangun sejumlah stasiun pengisian bahan bakar untuk umum tahun lalu, memilih untuk berkonsentrasi pada jasa pendudukan pengeboran.



Tahun 2006, Elnusa berhasil membukukan keuntungan bersih Rp 82 miliar, sementara tahun 2005 meraih keuntungan sebesar Rp 74 miliar.

Selain memutuskan soal IPO, RUPS Elnusa juga menetapkan penggantian direksi. Rudi Radjab, yang telah dua periode menjabat direktur utama, digantikan oleh Eteng A Salam yang sebelumnya menjadi Direktur SDM PT Pertamina.

Haris menambahkan, rencana pembangunan kilang yang sudah dirintis oleh Elnusa tidak termasuk dalam amanat RUPS.

Padaahal, Elnusa sudah menjajaki kerja sama dengan National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) untuk pembangunan kilang di Banten dengan kapasitas 400.000 barrel per hari. (DOT)

55

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2007

PROMOSI DOKTOR

Solusi Konflik Sumber Daya Alam Butuh Peran Negara

JAKARTA, KOMPAS – Konflik antara korporasi dan komunitas lokal terkait pengelolaan kekayaan sumber daya alam atau SDA, seperti yang sering terjadi di Indonesia, membutuhkan peran negara. Sayangnya, di Indonesia justru peran vital itu masih lemah.

Demikian salah satu butir pokok disertasi Dody Prayogo dalam promosi doktor sosiologi Program Pascasarjana Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP-UI), Selasa (17/7).

Melalui disertasi berjudul "Konflik antara Korporasi dengan Komunitas Lokal, Studi Kasus pada Industri Geotermal di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat",

Dody dinyatakan lulus dengan predikat *cum laude*. Bertindak sebagai promotor Paulus Wirutomo, dengan kopromotor Iwan Gardono Sudjatmiko, serta tim penguji terdiri atas Francisia SSE Seda, Hariyadi Wirawan, dan Henny Warsilah.

Mengamati relasi korporasi-komunitas lokal, lanjut Dody, sering kali diwarnai ketidakberimbangan peran dari keduanya. Semestinya negara mampu melibatkan dirinya menjadi relasi tiga sektor negara-korporasi-komunitas lokal.

Harapannya, tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau terabaikan dalam pengelolaan SDA. "Peran unsur negara—baik di pusat maupun di daerah—sangat sentral, yakni sebagai juri yang otonom. Tidak dapat didikte

korporasi atau investor asing maupun komunitas lokal," katanya.

Akan tetapi, yang umum terjadi selama ini—seperti terbaca dalam banyak regulasi—berbagai peran, kewajiban, dan hak-hak komunitas lokal tempat kegiatan eksploitasi SDA terjadi tidak pernah diakomodasi secara memadai. Regulasi lebih banyak mengatur hubungan negara dengan korporat serta berbagai konsekuensinya.

Padahal, kata Dody, secara sosiologis komunitas lokal merasa dirinya sebagai "pemilik" kekayaan SDA. Akibatnya, relasi yang tidak harmonis antara korporasi-komunitas lokal, ditambah berbagai latar belakang lain, memunculkan konflik-konflik dengan berbagai tingkatan.

Temuan penelitian Dody, dari berbagai faktor penyebab konflik ternyata faktor ketimpangan merupakan penyebab utamanya. Komunitas lokal selaku "pemilik" SDA yang secara turun-temurun berada di sumber kekayaan dipaksa menerima kenyataan di mana investor sebagai pendatang memperoleh keuntungan besar.

"Di sana ada soal ketidakadilan dan distribusi ekonomi yang tidak merata," ujarnya. Jika sejak awal negara mengatur ketentuan,

termasuk memasukkan faktor komunitas lokal selaku "pemilik" dengan berbagai konsekuensinya, ketimpangan itu dapat diatasi.

Beberapa rekomendasi yang diusulkan, di antaranya memberikan saham kepemilikan kepada komunitas lokal dan bukan sekadar kedermawanan sosial, mendefinisikan konsep "adil" dan "merata" secara bersama hingga mewujudkan relasi tiga sektor negara-korporasi-komunitas lokal. (GSA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2007

Interpelasi Lapindo Mentok

Sikap Agung Laksono menuai protes para anggota.

JAKARTA — Setelah Selasa pekan lalu gagal menghadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang interpelasi soal Iran, kemarin Dewan Perwakilan Rakyat kembali menemui jalan buntu dalam mengusung usul interpelasi kasus lumpur panas Lapindo Brantas Inc. Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono, sikap Dewan terbelah dua.

Lima fraksi menyatakan tetap menyokong interpelasi dilanjutkan. Mereka adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Damai Sejahtera. Adapun lima fraksi lain, yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Par-

tai Persatuan Pembangunan, Pelopor Bintang Demokrasi, dan Partai Bintang Reformasi, meminta interpelasi diserahkan ke Badan Musyawarah untuk dijadwalkan kembali.

Sejak awal sidang, pembahasan mengenai interpelasi ini berlangsung alot. Baru saja Abdullah Azwar Anas usai membacakan usul mewakili para pendukung interpelasi, hujan interupsi pun datang bertubi-tubi. Sebagian mendukung dan sebagian yang lain menyatakan interpelasi dalam kasus lumpur panas itu bukan solusi yang diperlukan saat ini. "DPR berkepentingan meminta penjelasan pemerintah," kata Abdullah berkukuh.

Kubu antiinterpelasi juga tak kalah *ngotot*. Darul Siska dari Partai Golkar, contohnya, dalam interupsinya mempertanyakan relevansi interpelasi. Ia mengusulkan lebih baik dibuat badan pengawas, sehingga kinerja DPR lebih nyata dan tepat. "Saya bukan mau meng-

hambat interpelasi, tapi yang penting mendukung dan bantu masyarakat," ucapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hassan. Menurut dia, sejauh ini pemerintah sudah serius mengatasi masalah lumpur Lapindo. Hal itu tampak dari pembuatan dua keputusan presiden dan pembentukan badan khusus yang menangani dampak lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur. "Jangan dipolitisasi," ujarnya.

Melihat panasnya suhu dan alotnya persidangan, Agung Laksono menghentikan sidang selama satu jam. Ia meminta semua pemimpin fraksi melancarkan lobi.

Ketika sidang dibuka kembali saat menjelang petang, tiap-tiap fraksi telah menentukan posisinya. Namun, dengan alasan tidak etis, Agung Laksono tidak bersedia menyebutkan nama fraksi dan sikapnya. Ia hanya mengatakan bahwa lima fraksi berpendapat agar sidang

hari itu tidak mengambil keputusan menetapkan interpelasi. "Usul akan diagendakan kembali pada sidang paripurna berikut pada 20 Juli."

Sikap Agung ini menuai protes. "Dalam konsultasi disepakati sikap masing-masing fraksi akan diumumkan," kata Abdullah, yang berasal dari Fraksi PKB. Karena itulah, menurut dia, fraksinya akan melayangkan protes resmi. Ia juga berharap pemimpin sidang paripurna berikutnya tidak lagi dipegang Agung Laksono.

Protes terhadap sikap Agung sebelumnya juga disampaikan Panda Nababan dari PDI Perjuangan. Protes meluncur karena Agung sempat mengusulkan sidang ditunda dengan alasan yang tak relevan, yakni ada tamu dari Organisasi Parlemen Internasional (IPO). Padahal, ketika itu hujan interupsi sedang berlangsung. "Tidak ada alasan IPO. Ini soal rakyat, lebih penting," ujar Panda.

● AQIDA SWAMURTI

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2007

Elnusa Lepas 20 Persen Saham ke Publik

JAKARTA — PT Elnusa, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dipastikan melantai di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun ini. Rapat Umum Pemegang Saham Elnusa, memutuskan perusahaan yang bergerak di hulu sampai hilir migas itu akan melepas 20 persen sahamnya ke publik.

Wadirut PT Pertamina, Iin Arifin Takhyan, mengemukakan hal ini di Gedung Departemen ESDM, Selasa (17/7) siang. "RUPS memutuskan akan melepas 20 persen saham milik Elnusa. Kita akan IPO (Initial Public Offering) pokoknya tahun ini,"

cetus Iin.

RUPS Elnusa berlangsung Senin malam. Meski tidak menyebutkan bakal meraup dana berapa besar dari IPO, Iin menegaskan, hasil penjualan saham itu bakal dijadikan dana perusahaan untuk pengembangan usaha di sektor hulu. "Nantinya dana IPO untuk tingkatkan kemampuan *service*-nya terutama di *upstream*," katanya.

Apakah dana IPO itu juga akan digunakan untuk pendanaan kilang, Iin menegaskan tidak digunakan. Sementara terkait *underwriter* mana yang akan ditunjuk, Iin menjawab belum ditunjuk.

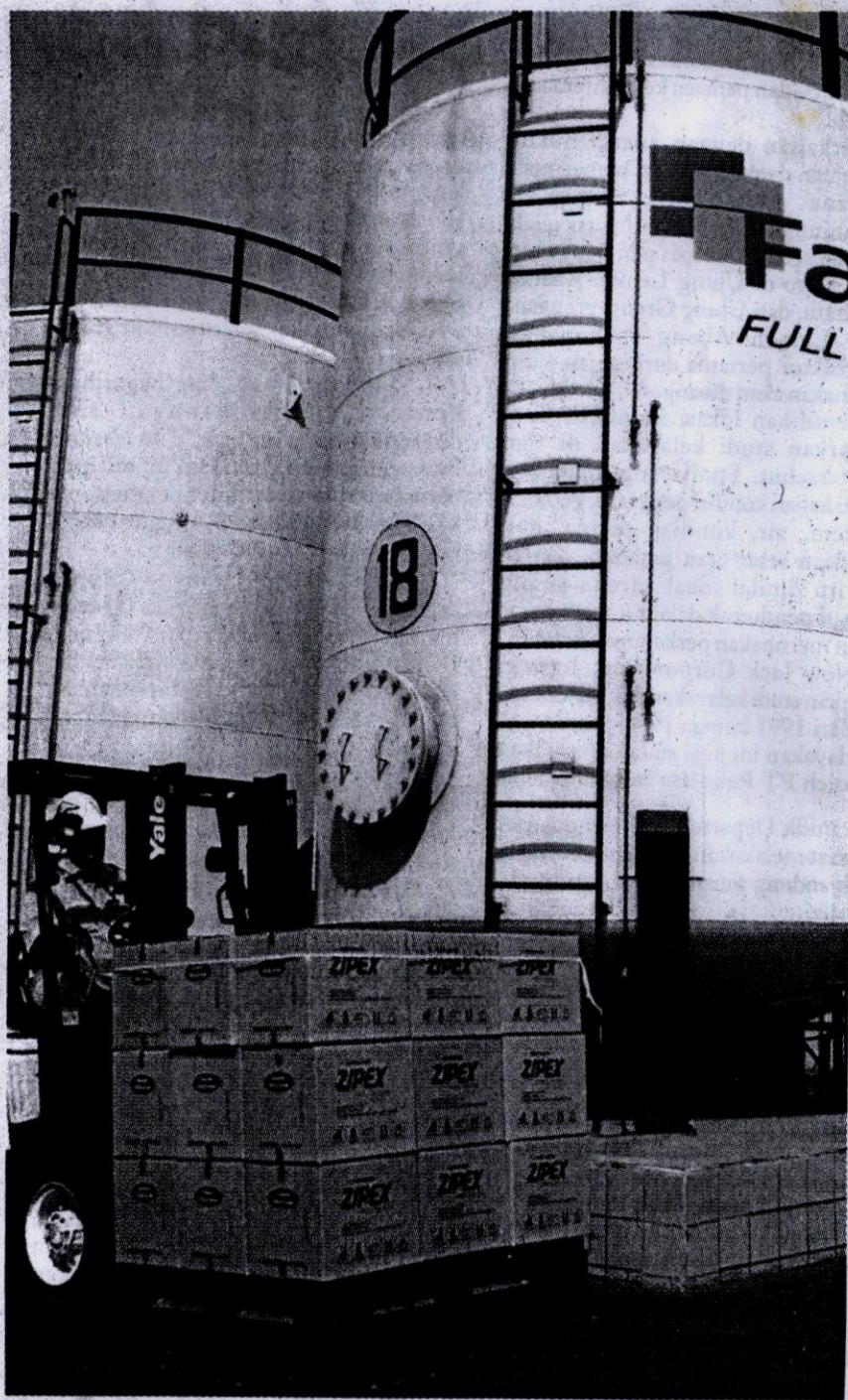
Saat ini, Elnusa dimiliki oleh PT Pertamina 51,38 persen, PT Tri Daya Esta (46,44 persen), PT Danareksa Daiwa NIF Ventures (1,94 persen), karyawan PT Elnusa (0,15 persen), Yayasan Hari Tua (0,07 persen), dan Koperasi Karyawan Elnusa (0,01 persen).

Tahun lalu, Elnusa diperkirakan meraup pendapatan sebesar Rp 1,8 triliun. Kegiatan usaha Elnusa secara umum dibagi menjadi tiga bagian yakni oil and gas services yang dijalankan oleh tiga anak perusahaan. Di bidang ini, anak perusahaan Elnusa yang terdiri atas El-

nusa Geosains, Elnusa Drilling Services, Elnusa Oilfield Services dan Elnusa Petrofin mengerjakan beberapa pekerjaan seperti seismic.

Sementara *oil and gas asset based* yang dikerjakan oleh Elnusa Bangkanai Energy Ltd yang mengerjakan pengelolaan wilayah kerja migas, serta bidang information, and communication technology yang dikerjakan oleh enam anak perusahaan yakni Patra Nusa Data, ELMIK, Sigma Cipta Utama, Elnusa Rentrakom, Patra Telekomunikasi Indonesia, dan Infomesia Nusantara.

■ evy



LEPAS ELNUSA: Pertamina bakal melepas 20 persen saham salah satu anak usahanya, PT Elnusa, tahun ini juga. Pertamina berharap bisnis Elnusa bisa lebih berkembang dan menjadi pemain utama di bidang usahanya. Tampak pekerja Pertamina di pabrik pelumas Fastron di Jakarta, Senin (16/7) lalu.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2007

Elnusa expects \$30 million from IPO

Andi Haswidi
The Jakarta Post/Jakarta

PT Elnusa, a subsidiary of state-owned oil firm PT Pertamina, expects to raise up to US\$30 million from the sale of a 20 percent stake during an initial public offering (IPO) latter this year, an official says.

"The IPO plan was approved by shareholders during a meeting Monday, Elnusa corporate secretary Haris Syahrudin told *The Jakarta Post* on Tuesday.

During the meeting, the shareholders also approved the appointment of Eteng A. Salam, Pertamina's director for development and human resources, as Elnusa's new president, replacing Ruddy Radjab.

The IPO is expected to take place at the end of this year or the beginning of next year, Haris said, while the proceeds from the sale of the 20 percent stake, which it is estimated will fetch about US\$30 million, will be used to finance oil

and gas exploration work.

As one of Pertamina's most profitable subsidiaries, Elnusa has 14 business units operating in the oil and gas sector, both upstream and downstream, and is also involved in the information technology field.

The firm is 51.38 percent owned by Pertamina and 46.44 percent by PT Tri Daya Esta, with the rest of its shares being divided up among 5 other companies.

However, Eteng's appointment has raised some concerns from within Elnusa's executive board.

Senior Elnusa executives fear that Eteng's appointment may affect its plan to build a \$7.3 billion oil refinery in Bojonegara, Banten, called the Greater Java Refinery Project, in collaboration with the National Iranian Oil Refinery & Distribution Co.

Construction of the refinery is supposed to start by the end of this year, with the completed plant expected to come onstream in 2012 with produc-

tion capacity of 300,000 barrels per day.

The project is fully backed by the Banten provincial administration, whose chief executive, Governor Ratu Atut Chosiyah, signed a memorandum of understanding on the project with the then Elnusa president director, Rudy Radjab, in April.

"This refinery is a mega project. If it proceeds as scheduled, this will contribute significantly to the success of the IPO in terms of share price. But our proceeds estimate has been arrived at without including the project," Haris said, while refusing to confirm whether it would actually go ahead or not.

While acknowledging that the fate of the project was at stake, the director of the project, Safrul, told the *Post* that the company remained committed to the project.

"To the best of my knowledge, the government is clearly committed to this project, as stated by Vice President Jusuf Kalla when he met with the

Iranian officials some months ago," he said.

However, when asked about Pertamina's stance regarding the project, Safrul said that its position was unclear.

"In writing, they say that they want to participate in the project, but in reality they are still wavering, saying that there has been no guidance from the number-one man in Pertamina about it so far," he revealed.

The project has also attracted the attention of other companies, including PT Medco Energi International, which is currently still conducting a feasibility study, Medco corporate secretary Andy Karamoy said.

Talk about Iranian interest in participating in a refinery project in Indonesia first surfaced during a visit by a delegation from the Iranian parliament led by A. Hadad Adel in February. Apart from Indonesia, Iran is also planning to participate in the development of four other refineries in other Asian countries.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2007

UU Energi Disahkan

JAKARTA – DPR RI secara aklamasi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi menjadi UU, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Jakarta, Selasa (17/7). Sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dan Ketua DPR Agung Laksono.

“Dengan disahkannya UU Energi ini, kebijakan subsidi diharapkan hanya ditujukan pada masyarakat dan bukan lagi produk energi, seperti BBM,” harap juru bicara Fraksi Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam sidang paripurna DPR, kemarin.

Juru bicara Fraksi PAN Alvin Lie mendesak agar pemerintah menerapkan model subsidi yang lebih jujur, adil, transparan, dan tepat sasaran. Sementara itu, juru bicara Fraksi PDIP Effendi Simbolon mengharapkan adanya sinkronisasi UU Energi dengan UU lainnya, seperti UU Migas dan UU Panas Bumi, serta UU lain yang masih dalam pembahasan, yakni RUU Minerba dan RUU Ketenagalistrikan.

Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera, Muhammad Lutfi. Dia meminta pemerintah agar mengimplementasikan UU energi ke seluruh departemen terkait. Ade Daud Nasution, wakil dari Fraksi Bintang Reformasi, mengatakan, selama ini Indonesia terpaku pada energi fosil dan terlambat mengembangkan sumber energi yang terbarukan.

UU Energi memuat kemandirian pengelolaan energi, tersedianya sumber energi dari dalam negeri untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri, dan peningkatan devisa negara.

UU tersebut juga mengamanatkan, harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian yang berkeadilan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu. Selain itu, pemerintah juga wajib melaksanakan tindakan yang diperlukan, untuk mengatasi kondisi krisis maupun darurat energi. UU itu juga memberikan akses bagi masyarakat, untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan maupun monitoring pelaksanaan kebijakan di bidang energi.

Seusai sidang, Ketua Komisi VII DPR Agusman Efendi mengatakan, pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah, supaya UU Energi dapat diimplementasikan secara efektif. “Pemerintah juga harus segera membentuk Dewan Energi Nasional (DEN) paling lambat 6 bulan setelah UU disahkan UU,” katanya.

Menurut Agusman, UU Energi akan menimbulkan implikasi ke bisnis sektor energi. Karena itu, pemerintah diminta merancang sistem insentif dan disinsentif bagi swasta, sehingga energi baru dan terbarukan dikembangkan secara seimbang.

Purnomo Yusgiantoro menambahkan, UU Energi akan dijadikan pedoman bagi pemerintah, untuk pembangunan energi berkelanjutan. "Kami juga akan mengupayakan pembentukan DEN dalam waktu 6 bulan ke depan. DEN langsung diketuai Presiden, akan merancang, menetapkan, dan mengawasi kebijakan energi yang bersifat lintas sektoral.

Purnomo juga mengatakan, sesuai UU itu, harga energi akan ditetapkan pemerintah sesuai nilai keekonomian yang berkeadilan. Nilai keekonomian berkeadilan adalah biaya yang merefleksikan biaya produksi energi, termasuk biaya lingkungan, dan biaya konservasi yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat.

Purnomo menambahkan, penetapan harga tersebut tetap dengan mendengar masukan para pemain energi, baik produsen maupun konsumen. "Penetapan harga ini terkait dengan final produk yang lebih banyak ke pemanfaatannya," ujarnya. **(jad)**

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 12

TAHUN 2007

RAPAT PARIPURNA

**DPR Gagal
Putuskan
Interpelasi
Lapindo**

JAKARTA – Rapat paripurna DPR, Selasa (17/7) gagal memutuskan usulan penggunaan hak interpelasi DPR terhadap pemerintah atas luapan lumpur Lapindo Brantas di Sidoarjo. Hak interpelasi itu diusulkan oleh lima fraksi DPR dengan dukungan tanda tangan sebanyak 257 anggota DPR.

Lima fraksi yang menyepakati penggunaan hak interpelasi penanganan bencana lumpur panas Sidoarjo adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS).

Ketua DPR Agung Laksono yang memimpin rapat mengatakan, kelima fraksi DPR itu mendesak pengambilan keputusan hak interpelasi. Namun, sebanyak lima fraksi lainnya menyepakati penundaan pengambilan keputusan. Kelima fraksi itu adalah Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, dan Fraksi Partai Per-

satuan Pembangunan. "Akhirnya setelah melalui konsultasi pimpinan fraksi disepakati menyerahkan masalah itu ke rapat Bamus 19 Juli 2007," ungkapnya.

Menanggapi keputusan penundaan tersebut, Fraksi PDIP diwakili Panda Nababan dan Ketua PKB Ida Fauziah melakukan jumpa pers. Ida menyangkan keputusan paripurna tersebut. "Saya menjadi ragu langkah penundaan pengambilan keputusan interpelasi sebagai upaya menunda rencana penggunaan interpelasi DPR atas penanganan luapan lumpur Lapindo," ujarnya.

Panda Nababan mendesak pengambilan keputusan dilaksanakan paling lambat Jumat (20/7). Sebab, pekan depan DPR sudah mulai reses, sehingga penundaan bisa berdampak pada menghilangkan isu interpelasi luapan lumpur Lapindo ini.

Anggota DPR Abdullah Azwar Anas mengatakan, penggunaan interpelasi bertujuan mempercepat penanganan luapan lumpur panas itu. Bencana ini telah terjadi sekitar 1,5 tahun, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganannya, termasuk nasib ribuan warga.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarif Hassan menilai, pemerintah sangat serius menangani masalah ini. "Presiden SBY telah berkantor hingga tiga hari di Sidoarjo menunjukkan keseriusan pemerintah. Kami minta bencana ini tidak dipolitisasi," ungkapnya. (hut)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B7

TAHUN 2007

Pemerintah Bakal Tahan Bonus Direksi PGN

JAKARTA — Pemerintah mengancam tidak membagikan bonus (tantiem) kepada manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi Roes Aryawijaya mengatakan peluang pembagian tantiem untuk tahun buku 2006 semakin kecil. Ini lantaran *molor*-nya penyelesaian proyek pemipaan gas dari Sumatera Selatan ke Jawa Barat.

"Kalau kondisinya seperti ini, peluangnya semakin kecil," kata Roes

kepada *Tempo* di kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Manajemen telah berjanji akan menyelesaikan proyek tersebut bulan ini. Seharusnya proyek pemipaan itu selesai pada Maret lalu. Namun, manajemen kembali mengumumkan penundaan pengerjaan proyek tersebut.

Sumber *Tempo* di pemerintahan mengatakan jumlah tantiem yang akan dibagikan kepada direktur utama misalnya sekitar Rp 2,4 miliar. Namun, berdasarkan perhitungan di

Kementerian BUMN, jumlahnya bisa mencapai Rp 3,4 miliar.

Sumber menambahkan tantiem itu sangat berharga bagi anggota direksi PGN untuk menutup kerugian karena harus membayar denda.

Pengamat pasar modal Yanuar Rizky mengatakan pemerintah sebaiknya menahan bonus yang akan dibagikan kepada manajemen perusahaan gas negara itu. "Jangan dibagikan. Ini sebagai hukuman atas kinerja buruk manajemen," kata dia.

Membaiknya kinerja perusahaan

tahun lalu disebabkan oleh kenaikan harga gas di pasar internasional. "Jadi itu bukan karena kinerja jajaran direksi," kata Yanuar.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenakan denda kepada manajemen PGN sebesar Rp 5 miliar, karena manajemen dinilai lalai menyampaikan keterbukaan informasi tentang keterlambatan pembangunan proyek pemipaan Sumatera Selatan-Jawa Barat. Akibatnya, harga saham PGN terpuruk awal tahun ini. ● BUDIRIZA

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2007

House enacts new energy law, hopes to encourage sustainability

The Jakarta Post
Jakarta

The House of Representatives has enacted a new Energy Law that is aimed at securing sustainable energy supplies, and promoting energy conservation and the use of renewable energy resources.

In a plenary session Tuesday, all 10 House factions agreed by acclamation to enact the new law. The legislation was initiated by the House, and had been under discussion by the House's energy commission with the government, the private sector and other stakeholders since 2006.

"A review and revitalization of our national energy policy must be the first priority, as energy is a vital public need whose provision is the responsibility of the state," commission chairman Agusman Effendi said of the law.

The new legislation sets out the broad policies for the development of the energy sector, and will be complementary to other energy-related laws,

including the 2003 Geothermal Law, the 2001 Oil and Gas Law, the 1997 Nuclear Energy Law, and the bills currently being deliberated to replace the 1985 Electricity Law and the 1967 Mining Law.

The policies set out in the bill include the maintaining of a strategic energy reserve to ensure the nation's energy security, consisting of not only conventional fossil fuels (oil, gas and coal), but also renewable energy resources, such as biofuels, hydropower, and geothermal energy.

In addition, the law envisages the development of renewable energy resources through pricing mechanisms and incentives, with the latter also being employed to promote efficient energy use.

Under the law, both the central government and local administrations are required to actively participate in ensuring the success of the new policies by providing tax breaks and financial incentives to industries that avail of renewable energy and engage in energy conservation.

Energy subsidies for the poor will also be maintained.

A National Energy Board must be set up within six months after the law's enactment to serve as the highest-level policy maker in all energy sector development programs. The board will be chaired by

the President and have the energy and mineral resources minister as a member.

Energy and Mineral Resources Minister Purnomo Yusgiantoro, who attended the plenary session, said the government would first work on

drafting the government regulations establishing the board, and then the other ancillary regulations required to give effect to the legislation.

"With this new law, and with the board directly chaired by the President, we expect sustainable energy policies in the future to be more effective and better enforced," he said.

The ministry is currently discussing possible fiscal incentives with the tax service in connection with the law.

Prior to the enactment of

the new law, President Susilo Bambang Yudhoyono issued a presidential decree on national energy policy, which envisages renewable energy accounting for 17 percent of the nation's energy consumption by 2025, with oil's share being reduced to 20 percent.

Oil currently accounts for 54 percent of the energy mix for the country's 220 million people, with the growing demand for energy posing the threat of an energy crisis in the future in the absence of sustainable energy policies.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2007

Kasus PGN Mulai Dibahas Komite Penetapan Sanksi

JAKARTA – Komite Penetapan Sanksi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mulai membahas kasus *insider trading* dalam penurunan harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang diduga merugikan negara.

Ketua Bapepam-LK A Fuad Rahmany mengungkapkan telah menerima hasil pemeriksaan kasus PGN. "Mulai pekan ini akan dibahas," kata Fuad yang juga ketua Komite Penetapan Sanksi di Jakarta, Selasa (17/7).

Menurut dia, penyelesaian kasus ini bisa berupa sanksi atau dilimpahkan ke penyidikan Kejaksaan Tinggi. Keputusan ini akan dibahas lebih dahulu oleh komite tersebut.

Sebelumnya, Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam-LK Wahyu Hidayat mengatakan telah menyerahkan hasil pemeriksaan kasus tersebut kepada Komite Penetapan Sanksi. Komite itu terdiri dari Ketua Bapepam-LK, Kabiro Standar Keterbukaan Informasi, Kabiro Riset dan Teknologi Informasi, Sekretaris Bapepam-LK, dan Kabiro Transaksi Lembaga Efek.

Wahyu mengatakan, Komite Penetapan Sanksi bisa mengambil dua alternatif keputusan. Pertama, mengenakan sanksi administratif bagi tersangka yang telah diperiksa. Kedua, melimpahkan kasus tersebut ke kejaksaan untuk disidik.

Menurut dia, ada tiga pihak yang diperiksa dalam kasus PGN, yakni broker, investor, dan orang dalam yang diindikasikan terlibat dalam kasus tersebut. "Kalau nanti diputuskan dikenai sanksi administratif, tidak harus direksi yang dikenai, bisa saja orang dalam," jelasnya.



Investor Daily/EKO S HILMAN

"Penyelesaian kasus ini bisa berupa sanksi atau dilimpahkan ke penyidikan Kejaksaan Tinggi."

● Fuad Rahmany,
Ketua Bapepam-LK A

Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam-LK Robinson Simbolon mengatakan, pihak-pihak yang terkena sanksi administratif dalam kasus *insider trading* terancam hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp

15 miliar. "Sesuai undang-undang begitu bunyinya, tapi realisasinya nanti terserah hakim, itu kewenangan hakim," tukasnya.

Biro Pemeriksaan

Sementara itu, Bapepam memulai pemeriksaan kasus transaksi saham PT Agis Tbk (TMPI) awal pekan ini setelah menerima pelimpahan hasil pemeriksaan Bursa Efek Jakarta (BEJ) akhir pekan lalu.

Kabiro Transaksi dan Lembaga Efek Arief Baharudin mengatakan, setelah mengkaji selama sehari masalah Agis, Bapepam langsung melimpahkannya ke biro pemeriksaan dan penyidikan.

Sementara itu, BEJ menyuspensi broker PT Kuo Capital Raharja pada Senin (16/7) karena ditemukan laporan pembukuan yang tidak akurat.

"Sehubungan dengan hasil pemeriksaan, Tim Satuan Pemeriksa Anggota Bursa ternyata menemukan catatan pembukuan Kuo Capital Raharja tidak akurat," kata Kepala Divisi Perdagangan Bursa Efek Jakarta Supandi di Jakarta, Senin (16/7).

Menurut sumber *Investor Daily*, suspensi broker itu karena salah menempatkan rekening, sehingga modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) Kuo Capital berkurang dari persyaratan sehingga langsung disuspensi.

Kuo Capital pernah disuspensi BEJ pada sesi I (29 Juni 2007) karena tak sanggup menyelesaikan kewajiban atas transaksi saham TMPI sekitar Rp 91 miliar dan dibuka kembali setelah menyelesaikan kewajiban tersebut pada 3 Juli 2007. MKBD yang disyaratkan kepada anggota bursa sampai dengan saat ini minimum Rp 25 miliar. (ari/rad)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2007

Saham Medco Cenderung *Sideways*

Saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) cenderung bergerak mendatar (*sideways*). Secara teknis, pergerakan saham di sektor pertambangan itu mulai terbatas.

"Harga MEDC bergerak di kisaran Rp 3.450 hingga Rp 3.850," kata analis PT Sinarmas Sekuritas Alfiansyah kepada *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (17/7).

Pada perdagangan kemarin, MEDC menguat Rp 75 (2,08%) ke level Rp 3.675 per saham. Sedangkan volume transaksi tercatat sebanyak 5,1 juta saham.

Menurut dia, saham Medco bergerak mendatar sejak tahun lalu. Potensi kenaikan kembali harga saham Medco hanya dapat ditopang faktor fundamental yang cukup kuat. Bahkan, kenaikan harga minyak mentah dunia yang sempat menyentuh US\$ 79 per barel tidak cukup signifikan memberi sentimen positif bagi MEDC.

"Pergerakan saham Medco juga tidak terpengaruh momen-

tum penguatan indeks," tegas dia.

Di sisi lain, posisi *sideways* MEDC tersebut dimanfaatkan

pemodal untuk memburu saham pertambangan lain yang dinilai masih menjanjikan. Walaupun demikian, indikator teknis bulanan masih menunjukkan tren *upside* bagi saham di industri minyak tersebut.

Sementara itu, analis PT Sarijaya Permana Sekuritas Rafdi Prima juga berpendapat senada. Sejak Maret 2007 pergerakan harga saham Medco cenderung stagnan. "Harga MEDC bolak-balik di kisaran Rp 3.500-3.800 per saham," imbuhnya.

Bahkan, dia menjelaskan, harga MEDC juga berpotensi melanjutkan pelemahan hingga menembus level Rp 3.500. "Kita tunggu dulu hingga MEDC mampu mencapai Rp 3.800 per

saham," imbuhnya.

Untuk itu, dia menyarankan pemodal untuk *wait and see*

saham Medco, karena pergerakannya yang cenderung tidak berubah. Beberapa indikator

teknis juga menunjukkan MEDC cenderung *sideways*.

Indikator *relative strength index* (RSI) dalam posisi netral. Sedangkan *stochastic oscillator* mengisyaratkan saham Medco mulai bergerak melemah. "Volume transaksi yang dibukukan juga relatif kecil," imbuhnya.

Cadangan Minyak

Sebelumnya, analis PT BNI Securities Norico Gaman mengatakan, saham Medco menarik untuk dikoleksi dalam jangka panjang, seiring aktifnya perseroan mencari cadangan minyak dan gas di Afrika serta Timur Tengah.

Menurut dia, rencana Medco menganggarkan dana sebesar US\$ 30 juta untuk menjajaki eksplorasi ladang minyak dan gas di Afrika serta Timur Tengah bakal berimbas positif bagi kinerja dan pergerakan sahamnya. Sejauh ini,

Pergerakan Saham
PT Medco Energi Internasional Tbk.



Medco hanya melakukan eksplorasi di dalam negeri untuk menjaga pertumbuhan laba bersih perusahaan.

Norico mengaku, kinerja perseroan masih cukup positif, karena prospek usaha ke depan

yang mengembangkan sektor energi terintegrasi. "Saat ini, minyak dan gas mengontribusi sekitar 70% dari total pendapatan Medco. Tentunya, dengan langkah

ekspansi usaha ke Afrika dan Timur Tengah akan meningkatkan kontribusi perusahaan," jelasnya.

Selain itu, tambah Norico, Medco memiliki usaha di bidang tenaga listrik (*power plant*) dan kontraktor pertambangan melalui anak usahanya, PT Apexindo

"Harga MEDC bergerak di kisaran Rp 3.450 hingga Rp 3.850."

• **Alfiansyah,**
analisis PT Sinarmas Sekuritas

Pratama Duta Tbk (APEX). "Kami memproyeksikan pendapatan Medco tahun ini mencapai US\$ 835,5 juta dari sebelumnya US\$ 792,4 juta," ujar dia.

Earning per share (EPS) bakal mencapai US\$ 0,031 dari tahun lalu US\$ 0,012. Sedangkan laba bersih 2007 akan menembus US\$ 100,1 juta dibanding 2006 sebesar US\$ 38,2 juta.

Harga MEDC ditransaksikan pada *price to earning ratio* (PER) 12,8 kali dan *price to book value* (PBV) 0,7 kali. Sedangkan PER dan PBV 2008 masing-masing diperkirakan sebesar 9,7 kali dan 0,5 kali. Target harga MEDC untuk 12 bulan ke depan pun dipatok Rp 4.000 per saham.

Rekomendasi

Alfiansyah merekomendasikan *hold* MEDC, meski untuk jangka panjang masih berpeluang menguat. MEDC bergerak dalam kisaran terbatas di level Rp 3.450-3.850 per saham. Sedangkan Rafdi menyarankan *wait and see*, karena pergerakannya cenderung *sideways*. (art)

Tips MEDC

Tren

- ▶ Jangka pendek: mendatar
- ▶ Jangka menengah-panjang: menguat

Fundamental

- ▶ Akhir 2007, laba bersih Medco diproyeksikan US\$ 100,1 juta
- ▶ PER: 12,8 kali, PBV: 0,7 kali

Teknis

- ▶ RSI: netral
- ▶ Stochastic: mulai bergerak turun

Rekomendasi

Alfiansyah:

- ▶ Hold
- ▶ Kisaran harga Rp 3.450-3.850

Rafdi Prima:

- ▶ Wait and see
- ▶ Kisaran harga Rp 3.500-3.800

CATATAN: Materi tulisan yang disajikan dalam artikel di atas hanya memberikan informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau ajakan kepada siapa pun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal.

65

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007

Interpelasi Lapindo Terganjal

Pemerintah gagal melindungi hak warga korban Lapindo.

JAKARTA — Sidang Paripurna DPR, Selasa (17/7), gagal menyepakati interpelasi kasus lumpur Lapindo. DPR kembali menunda keputusan interpelasi dengan menyerahkan masalah ini ke Badan Musyawarah, untuk diagendakan ulang.

Sejak awal, pembahasan interpelasi berjalan alot. Melalui anggotanya, Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), serta Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD), berupaya menghadang lolosnya interpelasi ini. Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menginginkan interpelasi bisa diloloskan.

Ketua FBPD, Syarif Hasan, dalam interupsinya mengungkapkan bahwa pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan masalah. Terbukti dengan diterbitkannya Perpres 14 tahun 2007, BPLS, maupun mengejar komitmen dan tanggung jawab Lapindo dalam mengatasi dampak Lumpur terhadap masyarakat. Syarif menyebut "ngantornya" SBY di Sidoarjo merupakan bentuk komitmen pemerintah.

Anggota FPG, Darul Siska, mengalihkan isu interpelasi dengan mengusulkan dibentuk badan pengawas. "Bagaimana kita lebih perhatian, memberi dukungan dalam bentuk nyata dibanding ha-

nya bertanya kepada Presiden."

Kubu PDIP dan PKB melalui anggotanya tak kalah sengit memberikan perlawanan. Anggota FPDIP, Arya Bima, menegaskan, interpelasi tidak akan dilakukan kalau pemerintah sudah bekerja dengan baik. Ditegaskannya tujuan interpelasi adalah mendorong pemerintah untuk mempercepat proses penanganan Lumpur Lapindo. Persoalan pembentukan Badan Pengawas bisa dilakukan setelah presiden memberikan jawaban interpelasi.

Dengan alotnya pengambilan keputusan interpelasi, Pimpinan Sidang Agung Laksono, menskors sidang untuk lobi antar pimpinan fraksi. Hasil lobi antarfraksi gagal menyepakati interpelasi. Mereka hanya menye-

pakati dilakukan penundaan pengambilan keputusan soal interpelasi. Masalah interpelasi akan dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (19/7), untuk dijadwalkan kembali.

Berjalan alot

Anggota Fraksi PAN, Joko Susilo, menjelaskan lobi yang dipimpin Agung Laksono memang berjalan alot. Fraksi PDIP, PAN, PKB, PPP, dan PKS meminta agar interpelasi disetujui dan ditetapkan pada saat itu juga. Tapi FPG, BPD, PDS, PD, dan PBR menolaknya. Mereka meminta agar pengambilan keputusan ditunda.

Lima partai pendukung interpelasi sepakat ditunda. Tapi mereka minta agar masalah interpelasi langsung di agendakan di Paripurna DPR, Jumat (20/7). Lagi-lagi lima partai ini menolak dengan meminta agar dibawa dulu ke Bamus DPR. Sehingga Bamus yang menjadwalkan paripurna.

Joko menyesalkan penundaan pengambilan keputusan interpelasi. Menurutnya, ada kesan dilakukan upaya mengulur-ulur waktu pembahasan.

"Padahal masyarakat menginginkan agar masalah lumpur segera bisa diselesaikan," kata Joko. ■ dwo

Fakta Angka

3.500 orang

Menjadi pengungsi akibat lumpur Lapindo.

66

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 18

TAHUN 2007

Insider Trading PGN Dibahas Pekan Ini

JAKARTA (SINDO) – Komite Penetapan Sanksi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mulai membahas dugaan insider trading saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) pada pekan ini. "Saya belum tahu bagaimana arahnya, nanti akan dibahas pekan ini," kata Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany di Jakarta, kemarin.

Dia mengaku belum membaca laporan hasil pemeriksaan insider trading PGN, sehingga belum mengetahui bagaimana arah yang akan diambil otoritas pasar modal itu. Sebelumnya, Bapepam telah memeriksa broker, investor, dan orang dalam dari PGN. Broker yang diperiksa otoritas pasar modal itu adalah broker terbesar yang bertransaksi pada tanggal-tanggal tertentu sebelum anjaknya saham PGN Januari lalu.

Anggota Komite Penetapan Sanksi itu terdiri atas Ketua dan Sekretaris Bapepam-LK, dan beberapa kepala biro, yaitu Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Biro Riset dan Teknologi Informasi, serta Biro Transaksi dan Lembaga Efek.

Kasus PGN mencuat setelah harga saham perseroan merosot tajam pada perdagangan 12 Januari 2007. Saham yang berkode PGAS itu anjlok 23,2% dari posisi Rp9.650 pada saat pembukaan perdagangan, menjadi Rp7.400 per saham pada posisi auto reject halting (penghentian secara otomatis).

Penurunan itu dipicu oleh pengumuman penundaan proyek pipanisasi SSWJ. Bapepam-LK telah menjatuhkan sanksi sebesar Rp5 miliar kepada lima direksi PGN karena melanggar Pasal 93 UU pasar Modal, dan sanksi denda Rp35 juta kepada perusahaan tersebut terkait dengan pelanggaran keterbukaan informasi.

(nunung ahniar)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : *20*

TAHUN 2007

Elnusa Akan IPO Tahun Ini

JAKARTA (SINDO) – PT Pertamina (persero) tahun ini akan melepas saham anak perusahaannya, PT Elnusa, sebanyak 20% melalui penawaran saham perdana (*initial public offering/IPO*). Putusan tersebut merupakan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Elnusa yang diselenggarakan Senin (16/7) lalu.

"Pemegang saham mengamanatkan kepada direksi agar Elnusa IPO tahun ini," kata Wakil Direktur Utama Pertamina lin Arifin Takhyani di Jakarta, kemarin.

lin memaparkan, dana hasil IPO tersebut akan digunakan untuk mengembangkan usaha Elnusa, khususnya di bidang hulu minyak dan gas (*upstream*). Namun, lin enggan menyebut berapa target dana yang akan dikumpulkan melalui IPO tersebut. lin hanya mengatakan bahwa saat ini Elnusa masih mempersiapkan proses IPO tersebut dan belum menunjuk penjamin emisi (*underwriter*) IPO tersebut. (**ahmad senoadi**)

68

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 00

TAHUN 2007



(1) SP/CHARLES ULAG

Perjanjian Kerja Sama PT Freeport

Presdir & CEO PT Freeport Indonesia (FI), Armando Mahler (kedua dari kanan), bersalaman dengan Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Yopie Kilangin (kiri), Sekjen Depnakertrans, Harry Heriawan Saleh (kedua dari kiri), Ketua Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja PT Freeport, Ramadhan Sipakkan (kanan), dan Sekretaris Serikat Pekerja PT Freeport, Agus Kreey di Jakarta, Senin (16/7), se usai penandatanganan kerja sama.

69

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 2

TAHUN 2007

Interpelasi Lapindo Tenggelam

Lima Fraksi Mendukung, Lima Fraksi Menolak

JAKARTA, KOMPAS — Rapat Paripurna DPR, Selasa (17/7), gagal mengambil keputusan soal usulan interpelasi Lapindo yang ditandatangani 225 anggota. Lima fraksi setuju mengambil keputusan dan lima fraksi lainnya menolak.

Rapat paripurna akhirnya menyerahkan kembali persoalan itu ke Rapat Badan Musyawarah dan Kamis besok dijadwalkan lagi.

Kesepakatan ini dicapai melalui proses lobi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi secara tertutup. Lobi dilakukan setelah terjadi perdebatan alot di rapat paripurna sekitar satu jam.

Ketua DPR Agung Laksono, selaku pemimpin lobi, tak mau mengumumkan posisi fraksi-fraksi itu meski sudah diprotes sejumlah anggota. Agung hanya menyebut lima mendukung dan lima menolak. Dia pun tergesa-gesa menutup rapat tanpa menghiraukan interupsi.

Berdasarkan keterangan Panda Nababan dari Fraksi PDI-P dan Djoko Susilo dari Fraksi Partai Amanat Nasional, lima fraksi yang mendukung itu adalah F-PDIP, F-PAN, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Adapun fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Partai Bintang Reformasi, dan Fraksi Partai Damai Sejahtera.

Penggembosan

Adanya upaya penggembosan interpelasi Lapindo sejak awal

sidang terbaca. Hal itu terlihat dari kehadiran anggota di persidangan yang hanya tersisa sekitar 117 orang. Padahal, penanda tangan interpelasi Lapindo berjumlah 225 orang.

Pimpinan sidang pun berubah. Apabila tiga materi sebelumnya dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari F-PDIP, memasuki materi interpelasi Lapindo, sidang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono.

Dalam kepengurusan Partai Golkar, Agung menempati posisi Wakil Ketua Umum, sedangkan Aburizal Bakrie adalah salah satu penasihat Partai Golkar.

Ketika memimpin, Agung sangat kentara mengarahkan sidang agar ditunda. Baru enam anggota berbicara, Agung langsung menawarkan sidang ditunda. Alasannya, dirinya harus segera menghadiri undangan acara ASEAN Inter-Parliamentary Organization.

Lontaran Agung ini pun langsung diprotes keras anggota. "Ini masalah rakyat, tidak boleh ada hal yang menggantikan," ucap Helmy Faisal Zaini dari F-KB. "Ini peristiwa penting menyangkut nasib rakyat," ujar Panda.

Abdullah Azwar Anas, sebagai penggagas interpelator, menegaskan agar Agung tidak lagi memimpin sidang interpelasi Lapindo karena sudah terlihat berpihak. Masa sidang DPR itu akan berakhir 20 Juli 2007.

Secara terpisah, koordinator korban lumpur Lapindo, Zulkifli menyatakan, para korban Lapindo di Porong, Sidoarjo, menilai interpelasi DPR tidak akan banyak berarti bagi mereka. Sebab para korban sekarang lebih membutuhkan tindakan nyata, seperti pembayaran semua ganti rugi. "Tidak ada penyelesaian substansial yang dapat kami harapkan dari interpelasi," kata Zulkifli. Pengamat politik Universitas

Paramadina, Yudi Latif, menyatakan, kebuntuan untuk menentukan jadi tidaknya pengajuan interpelasi Lapindo oleh DPR sangat mengesalkan. Padahal interpelasi yang menyangkut persoalan dalam negeri ini dipandang jauh lebih penting daripada kasus nuklir Iran. "Tidak ada alasan kuat mengurungkan niat interpelasi," katanya.

Dari Sidoarjo dilaporkan, keluhan lagi format baru sebagai syarat mendapatkan ganti rugi bangunan, khususnya bagi bangunan tanpa izin mendirikan bangunan, membingungkan korban lumpur. Mereka berharap format itu menjadi format terakhir yang ditetapkan dan warga segera mendapat ganti rugi.

Salah satu korban lumpur Lapindo, Irsak, mengeluhkan selah berganti-gantinya format yang harus dipenuhi korban lumpur sebagai syarat mendapatkan ganti rugi. (SUT/JON/NWO/APA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2007

INTERPELASI LUMPUR SIDOARJO GAGAL

Gara-gara Tamu, Ketua DPR Diprotes

Jakarta, RM. Lagi-lagi DPR dikalahkan Presiden setelah upaya menggolkan interpelasi kasus Lumpur Lapindo, Sidoarjo gagal.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono di Gedung DPR, kemarin, sebanyak 225 anggota DPR pengusul interpelasi kasus Lumpur Lapindo, tak mampu berbuat banyak meski ngotot agar rapat paripurna memutuskan kelanjutan interpelasi itu.

Dari jumlah fraksi, kekuatan sebenarnyaimbang, lima fraksi, PDIP, PAN, PPP PKB dan PKS, ngotot agar paripurna setuju interpelasi dilanjutkan pada agenda berikutnya.

Sedangkan lima fraksi lainnya, FPG, F-Demokrat, FBPD, FPBR, dan PDS, pada dasarnya setuju dengan hak interpelasi tetapi bukan untuk diputuskan sekarang melainkan diagenda-kan ulang pada masa sidang berikutnya melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Rapat paripurna sempat memanas ketika masing-masing kubu saling menginterupsi dan saling menyerang dengan berbagai argumennya.

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Eva Sundari yang memiliki rumah di Tanggulangin Sejahtera, Sidoarjo menilai tidak ada yang konkret

dari lembaga yang sudah dibentuk pemerintah. "Yang dibutuhkan, bukti nyata yang bisa dilakukan pemerintah terhadap para korban Lumpur Lapindo," katanya. Pihak yang pro dan kontra terus melakukan interupsi.

Sidang paripurna semakin ramai saat Ketua DPR Agung Laksono tiba-tiba mengusulkan sidang diskors karena ada tamu dari Asean Interparliamentary Organization yang sudah menunggunya.

Mendengar pernyataan Agung, kelompok yang pro interpelasi Lapindo tidak terima. Sedangkan kubu yang tidak mendukung interpelasi, seperti meminta Agung menutup sidang.

Begitu Agung akan mengetuk palu, Wakil Ketua FPDIP Panda Nababan langsung interupsi. "Persoalan Lapindo adalah persoalan rakyat yang serius, karena itu tidak layak Ketua DPR menomorduakan dan memilih

tamu. Ini peristiwa sangat penting, ini masalah rakyat yang sudah menderita. Soal tamu-tamu asing itu bisa nanti," tegas Panda yang disambut tepuk tangan pendukung interpelasi. Akhirnya Agung pun mengalah dan melanjutkan sidang.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Achmad Fauzi mengatakan sesungguhnya sudah banyak yang telah dilakukan pemerintah dan pihak Lapindo dalam mengatasi masalah ini termasuk diantaranya menyelesaikan persoalan warga.

"Misalnya saja Presiden pernah berkantor di sana, Lapindo setiap minggu mengeluarkan dana Rp 100 milyar untuk pembayaran warga dan semacamnya."

Akhirnya disepakati, untuk dilakukan lobby antar pimpinan fraksi. Dari hasil lobby akhirnya masalah interpelasi akan diputuskan kelanjutannya pada rapat Bamus DPR. ■ WIN/HPS

71

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 5

TAHUN 2007

■ Korban Lumpur Sidoarjo

Minarak Bayar Lagi Tanah Milik 131 Warga

Sidoarjo - PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kembali melakukan transaksi jual beli pada tanah terdampak milik 131 warga korban lumpur di wilayah Perumtas-1 dan Desa Kedungbendo, Senin (16/7) petang. Transaksi tersebut dilakukan pada lahan dengan bukti kepemilikan sertifikat maupun nonsertifikat.

Nilai transaksi 100 persen sebesar Rp 41.715.550.000. Sedangkan yang diterima oleh warga sebesar 20 persen dengan nilai Rp 8.343.110.000. "Tim kenotariatan akan terus bekerja melakukan pengecekan atas berkas yang telah lolos verifikasi untuk melakukan percepatan transaksi jual beli," kata Direktur Operasional PT MLJ, Bambang Prasetyo Widodo.

Transaksi tersebut

dilakukan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, dilakukan pada 78 bidang lahan/bangunan milik warga Perumtas-1 dengan luas tanah 5.419 meter persegi dan luas bangunan 4.084 meter persegi.

Pada tahap kedua, dilakukan transaksi pada tiga bidang milik warga Desa Kedungbendo status dokumen sertifikat, dengan luas tanah pekarangan 515 meter persegi dan bangunan 248 meter persegi.

Untuk transaksi tahap ketiga dilakukan pada 50 bidang lahan milik warga Desa Kedungbendo dengan status dokumen Letter C (nonsertifikat), luas pekarangan 20.416,45 meter persegi dan bangunan 5.245,90 meter persegi.

"Dalam transaksi ini PT MLJ tidak lagi membedakan

antara lahan dengan status sertifikat maupun nonsertifikat. Semuanya memiliki hak yang sama," ungkapnya.

Meskipun hampir setiap hari transaksi jual beli dilakukan, tetapi masih banyak di antara warga korban lumpur yang tidak bisa bersabar. Mereka minta agar tim verifikasi bentukan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan PT MLJ melakukan proses verifikasi dan transaksi lebih cepat lagi. Hal ini diungkapkan warga Perumtas-1 saat bertemu dengan perwakilan PT MLJ di Sidoarjo.

Menurut Kus Sulaksono, salah satu warga Perumtas-1, pihaknya telah mengajukan sekitar 5.000 bidang lahan untuk diverifikasi dari sekitar 6.815 lahan di wilayah Perumtas-1. Karena

itu, pihaknya berharap seluruh dokumen tersebut segera dilakukan verifikasi dan realisasi jual beli.

Tim Verifikasi BPLS dalam dua pekan terakhir ini telah melakukan verifikasi pada 2.874 berkas bidang lahan milik korban lumpur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.903 bidang milik warga Perumtas-1.

Jika mengacu pada kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat "ngantor" di Surabaya dan Sidoarjo pada akhir Juni 2007 lalu agar dilakukan verifikasi 1.000 bidang per minggu, tim ini sudah melakukan tugasnya dengan baik.

"Kami sudah mendapatkan penjelasan dan bukti-bukti dari tim verifikasi. Kami tinggal menunggu realisasi pembayaran," kata

Anang B Arifin, perwakilan Tim 16 Perumtas-1.

Kalbar Siap Tampung

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat H Usman Jafar mengatakan dirinya siap menampung korban lumpur Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, jika memang pemerintah belum memiliki lahan representatif.

Kepada *SH*, Selasa (17/7) pagi, Gubernur Usman mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap menampung hingga 100 keluarga, melalui program transmigrasi. Namun, sejauh ini, pemerintah pusat belum menyampaikan permohonan bantuan kepada daerah yang penduduknya jarang.

Menurutnya, Provinsi Kalbar berpenduduk empat juta lebih, luasnya satu setengah kali Pulau Jawa

dan Bali. Luas keseluruhannya 146.807 kilometer persegi dan sebagian besar arealnya belum digarap secara maksimal demi kepentingan pembangunan.

Dia mengatakan, jika ada permintaan dari pemerintah, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan mensinergikan dengan program sektor perkebunan, melalui program plasma, terutama perkebunan kelapa sawit.

"Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap warga negara bebas menentukan tinggal di wilayah mana saja di Indonesia. Kalbar terbuka, asalkan penduduk luar yang datang, bisa menyesuaikan diri dengan alam dan budaya masyarakat di Kalbar," ujarnya. ■

(chusunun hadi/aju)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2007

DPR Terbelah, Interpelasi Lapindo Gagal

JAKARTA (SINDO) – Fraksi-fraksi di DPR terbelah saat menyikapi usulan interpelasi bencana lumpur Lapindo (interpelasi Lapindo) yang diajukan 225 anggota Dewan. Akibatnya, rapat paripurna yang membahas usulan interpelasi Lapindo kemarin gagal membuat keputusan. Pimpinan rapat paripurna Agung Laksono selanjutnya mengembalikan usulan tersebut ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk dijadwal

ulang.

Dari sepuluh fraksi di DPR, lima fraksi menyatakan menolak proses pengambilan keputusan atas usulan interpelasi Lapindo. Sementara lima fraksi lain menyetujui proses pengambilan keputusan.

Fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Bintang Reformasi (FPBR), Fraksi PPP (FPPP),

dan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (FBPD).

Sementara fraksi yang menyetujui pengambilan keputusan adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), dan Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS).

Pertentangan dalam Rapat Paripurna muncul setelah juru bicara pengusul Abdulah Azwar Anas (FPKB) menyampaikan usulan hak interpelasi kasus lumpur Lapindo. FPG melalui Darul Siska dan Ferry Mursyidan Baldan mengemukakan, sebaiknya DPR membentuk tim pengawas untuk mengawasi langkah pemerintah dan Lapindo dalam menyelesaikan tanggung jawabnya.

Ketua FPD Syarif Hasan mengusulkan agar DPR sebaiknya membentuk tim pengawas daripada melanjutkan proses usulan hak interpelasi. Apalagi, pemerintah sudah berbuat maksimal menekan PT Lapindo untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang menjadi korban.

Namun, Aria Bima dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan usulan interpelasi bukan suatu hal yang mengada-ada dan pihaknya sepakat bahwa persoalan ini tidak dipolitikasi. Fraksi PDIP menganggap pemerintah dan Lapindo tidak serius menyelesaikan persoalan sehingga warga semakin menderita.

Sedangkan Ali Mubarak dari Fraksi PKB menyatakan persoalan justru semakin kompleks dan rakyat tidak mendapat perlindungan karena itu pihaknya mempertanyakan sejauh mana keseriusan peme-

rintah mengatasi persoalan. "Untuk ganti rugi 20% saja sulit, bagaimana dengan yang 80%," katanya. Dia juga menambahkan pihaknya tidak puas atas langkah pemerintah, termasuk tidak adanya penegakan hukum dalam kasus ini.

Senada dengan Ali Mubarak, Sundari dari Fraksi PDIP yang memiliki rumah di kawasan Lapindo itu tepatnya di Blok C 33 perumahan Tanggul Angin Sejahtera, mengemukakan sejak adanya luapan lumpur hingga saat ini persoalan semakin serius. Dia membeberkan bahwa di sana mulai terjadi konflik horizontal, pengungsi mulai diintimidasi, banyaknya angka *drop out* anak sekolah, munculnya berbagai penyakit, runtuhnya infrastruktur, dan tutupnya pabrik di sekitar Sidoarjo.

Rapat paripurna tersebut sempat memanas ketika Panda Nababan melakukan interupsi. Dia mengatakan pentingnya DPR mengambil keputusan atas hak interpelasi karena keputusan sangat penting dan ditunggu ribuan orang di Jawa Timur.

Saat Panda akan melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba pengeras suara mati dan dia berteriak memprotesnya. Pimpinan rapat, Agung Laksono kemudian menunda rapat untuk memberikan kesempatan lobi antarpimpinan Fraksi. Namun, upaya lobi yang dilakukan tidak juga membuahkan hasil.

"FKB menyatakan kecewa karena kita berharap interpelasi bisa diputuskan hari ini," ungkap

Ketua FKB Ida Fauziah dalam jumpa persnya bersama Wakil Ketua FPDIP Panda Nababan, sesaat setelah rapat paripurna berakhir.

Ida menjelaskan dalam proses lobi yang dilakukan ada ketidak-konsistenan dari beberapa fraksi. Menurut dia, beberapa fraksi yang semula menyatakan mendukung dilakukannya interpelasi atas bencana lumpur Lapindo ternyata dalam proses lobi menarik dukungannya. "Mereka tidak sepakat untuk interpelasi diagendakan hari ini (kemarin) menjadi hak DPR," jelasnya.

Ida mengatakan keputusan membawa kembali pembahasan interpelasi bencana lumpur Lapindo ke forum Bamus, merupakan langkah mundur. Menurut dia, ada kemungkinan interpelasi tersebut tidak disetujui oleh Bamus menjadi agenda dalam rapat paripurna terdekat.

Soal tidak terpenuhinya kuorum bila forum paripurna mengambil keputusan, Ida mengatakan hal itu bukanlah persoalan. Menurut dia, sebelum pembahasan interpelasi, forum paripurna juga telah menyepakati pengesahan delapan RUU pemekaran wilayah dan RUUDKI Jakarta. "Jadi kalau dipersoalkan mengenai kuorum, maka juga harus dipersoalkan mekanisme pengambilan keputusan dua RUU tersebut," jelasnya.

Wakil Ketua FPDIP Panda Nababan menyayangkan sikap fraksi-fraksi yang menolak dilakukan

nya pengambilan keputusan interpelasi kemarin. Menurut dia, interpelasi lumpur Lapindo merupakan upaya untuk mempercepat penyelesaian bencana yang membawa banyak korban.

"Waktu lobi, saya sudah bilang kepada fraksi-fraksi yang menolak bahwa adanya forum interpelasi akan semakin menguatkan percepatan penyelesaian kasus tersebut. Dengan interpelasi, Presiden dan DPR mempunyai kata sepakat tentang apa yang harus dilakukan serta secara bersama melakukan pengawasan," katanya.

Dengan adanya keputusan membawa kembali interpelasi lumpur Lapindo ke forum Bamus, Panda ragu persoalan tersebut bisa diagendakan dalam rapat paripurna terdekat. Rapat paripurna terdekat, kata dia, akan dilaksanakan pada 20 Juli mendatang. "Rapat terdekat akan membahas tiga agenda sekaligus penutupan masa sidang kedua sebelum reses. Ya saya harap jangan meleset lagilah," harapnya.

Ketua DPR Agung Laksono menyatakan, keputusan meng-agendakan kembali pembahasan interpelasi dalam Bamus sesuai dengan tata tertib (tatib) DPR. Menurut dia, bila dipaksakan, pengambilan keputusan tentang interpelasi, hal itu akan melanggar tatib. "Jumlah fisik kehadiran anggota tadi tidak kuorum bila dilakukan voting," ujarnya.

(suwarno/chamad hojin)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2007

Rupiah falls for second day as share prices rise

Agencies
Jakarta

Indonesia's rupiah fell for a second day on speculation some state-owned companies bought dollars to settle payments for crude oil imports. Bonds advanced after demand rose at a debt sale.

Southeast Asia's biggest oil and gas producer needs to import a third of its oil product requirements because its refining capacity isn't sufficient to meet consumption. PT Pertamina, the state oil and gas company, said on June 12 it plans to import 4.5 million barrels of sweet crude oil for delivery this month.

"There may have been some dollar buying by Pertamina due to the high oil prices,"

Tetsuo Yoshikoshi, a market analyst in Singapore at the treasury unit of Sumitomo Mitsui Banking Corp told Bloomberg. "The rupiah may decline toward the end of September," he said.

"Overseas demand has been declining due to risk aversion and local funds are picking up the slack."

— Edwin Syahrud, Head of fixed-income research at PT Danareksa Securities

Indonesia's currency dropped 0.2 percent to 9,059 against the dollar as of 4:10 p.m. in Jakarta, according to data compiled by Bloomberg. The rupiah may fall to 9,200 by the end of the third quarter, Yoshikoshi said.

Crude oil Monday reached an 11-month high on speculation increased refinery demand will trim U.S. stockpiles, according to a Bloomberg News survey of 15 analysts. Hedge-fund managers and other speculators last week increased the number of bets on rising oil

prices to the highest in at least 13 years.

"Oil prices may remain high and hit a record this month or in August, prompting Pertamina to rush to buy dollars," Yoshikoshi said.

Government bonds rose. The finance ministry today sold Rp 5.7 trillion (US\$629 million) of 2023 and 2037 securities after demand more than doubled for its planned combined offering of Rp 3 trillion.

It sold Rp 3.5 trillion of 16-year bonds at an average yield of 9.709 percent and Rp 2.2 trillion of 30-year

75

notes at 9.809 percent, Bhimantara Widyajala, a director at the ministry, told reporters in Jakarta.

"Overseas demand has been declining due to risk aversion and local funds are picking up the slack," said Edwin Syahrudat, head of fixed-income research at PT Danareksa Securities in Jakarta. "There's upside for bond prices as one can expect at least one more rate cut this year."

The yield on the 10 percent bond due July 2017 dropped 1 basis point, or 0.01 percentage point, to 8.977 percent, according to the Inter Dealer Market Association. The price rose 0.052, or Rp 520 per Rp 1 million face amount, to Rp 106.651. Bond yields move inversely to prices.

Ten-year yields may drop to 8.75 percent by year-end, Syahrudat said.

Bank Indonesia on July 5 lowered the rate used as a reference for bill sales by a quarter-percentage point to 8.25 percent. The central bank may lower borrowing costs to below 8 percent should the government meet its inflation target, Deputy Governor Aslim Tadjuddin said July 13.

Meanwhile, share prices closed 0.66 percent higher Tuesday on a technical rebound in selected big

caps led by Astra International, Bank Mandiri and Perusahaan Gas Negara, dealers said.

They said Astra Agro was also in the limelight after the company posted a 64.6 percent rise in first half to June net profit.

The Jakarta Stock Exchange composite index closed up 15.124 points at 2,301.342 on volume of 3.7 billion shares valued at Rp 3.2 trillion (\$353.08 million).

Gainers led decliners 115 to 67, with 74 stocks unchanged.

"The market was up slightly for much of the day given the mixed regional market performance. However, the rise in selected big caps in late session on a technical rebound, including in Bank Mandiri drove the index higher," Henan Putihrai analyst Prayoga Ahmadi Triyono said.

He said banking stocks were also higher as sentiment in the sector was lifted by the government's plan to further divest its stake in Bank Negara Indonesia through a secondary offering, scheduled for early August.

Bank Mandiri, the country's largest bank in assets term, rose Rp 75 to Rp 3,475, Bank Central Asia added Rp 150 to Rp 5,900 and Bank Danamon surged Rp 600 to Rp 8,100.

75

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : |

TAHUN 2007

DPR Gagal Putuskan Interpelasi Lumpur Lapindo

Nadia Lulu Nihayati
NERACA

Jakarta - DPR RI gagal mengambil keputusan mengenai hak interpelasi luapan lumpur Lapindo karena dari sepuluh Fraksi yang ada, tidak tercapai kata sepakat.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Agung Laksono di Jakarta, Selasa petang, terlihat Fraksi-Fraksi di parlemen terbelah dua yang masing-masing pihak terdiri atas lima Fraksi.

Lima Fraksi yang mendukung agar DPR menyetujui hak interpelasi ditetapkan yaitu PDI-Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Damai Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sedangkan lima Fraksi yang menolak hak interpelasi adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Peratuan Pembangunan (PPP) dan

Partai Bintang Pelopor Demokrasi.

Agung mengemukakan, adanya perbedaan yang tajam tersebut akan diselesaikan dalam rapat DPR pada Kamis besok (19/7).

Rapat Badan Musyawarah tersebut untuk menjadwalkan kembali kelanjutan hak interpelasi tentang lumpur Lapindo tersebut. Namun berdasarkan jadwal maka satu-satunya rapat paripurna yang masih tersisa untuk masa persidangan ini hanya pada Jumat (20/7) sekaligus sebagai paripurna penutupan masa persidangan DPR.

Anggota Fraksi PKB DPR Ida Fauziah menyatakan pihaknya sangat kecewa dengan keputusan rapat konsultasi tersebut karena keputusan DPR mengenai interpelasi ini ditunggu masyarakat khususnya para korban luapan lumpur tersebut.

"Kita sangat kecewa dengan hasil rapat paripurna hari ini. Ada Fraksi

yang semula mendukung interpelasi ternyata tidak menyetujui hari ini diputuskan," katanya.

Ia menyatakan ada upaya untuk menunda-tunda hak interpelasi sehingga persidangan DPR mendatang yang dimulai pada 16 Agustus 2007.

Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Panda Nababan juga menyatakan hal yang sama apalagi dalam rapat paripurna itu, ketika membahas hak interpelasi, ternyata sebagian besar bangku kosong.

Karena itu jika diambil keputusan melalui voting maka tidak mencapai kuorum untuk mengambil keputusan.

Ia menambahkan pihaknya akan konsisten mendukung hak interpelasi ini karena persoalan yang dihadapi korban semakin berlarut-larut sedangkan upaya pemerintah bersama PT Lapindo dinilai lamban.

Panda belum yakin apakah agen-

da pembahasan interpelasi Lapindo ini dapat dilakukan pada Jumat ini pada rapat paripurna tersebut telah ditetapkan tiga agenda pokok yaitu pengesahan RUU tentang Cukai, RUU tentang perseorangan terbatas dan penutupan masa persidangan.

"Jangan diplesetkan lagi dan jangan dianggap politisasi karena interpelasi merupakan hak untuk bertanya kepada pemerintah," katanya.

Sementara itu, di Sidoarjo, ada dugaan adanya hidrokarbon yang asal dari pusat semburan lumpur Lapindo Brantas Inc. di Porong Sidoarjo tampaknya semakin nyata.

"Hal ini bisa dilihat pada perubahan warna hitam persis seperti minyak itu terus mengikuti lumpur panas yang keluar dari pusat semburan lalu mengalir ke spill way, Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Ah-

Zulkarnaen, Selasa.

Meski terlihat tidak mencolok namun hidrokarbon tersebut terlihat dengan jelas di kawasan kali lumpur hingga ke areal spill way (saluran pelimpah).

Ahmad Zulkarnain mengatakan kandungan hidrokarbon memunculkan panas yang keluar dari pusat semburan, kemudian hidrokarbon itu mengalir mengikuti aliran lumpur spillway dan ke Kali Porong.

"Hidrokarbon sudah kita identifikasi, tapi belum menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang mengancam hayakan pada lingkungan," kata menegaskan.

Menyinggung apakah kehadiran hidrokarbon tersebut ada kaitannya dengan kandungan mineral yang ada di kawasan pusat semburan atau kawasan Porong dan sekitarnya Zulkarnain tidak berani menjawab karena bukan dalam kapasitasnya

76

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

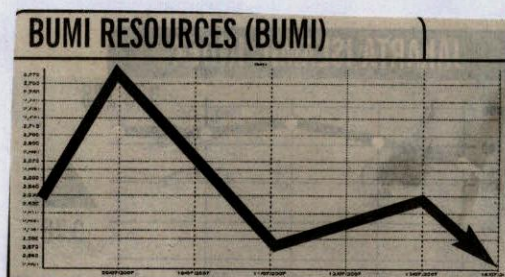
MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2007



Fundamental:

Bumi Resources membukukan laba bersih 80,00 juta dolar Amerika Serikat (AS) pada kuartal satu 2007, meningkat 224,28 persen dari periode sama tahun lalu 24,67 juta dolar AS. Pertumbuhan laba bersih yang signifikan tersebut didorong oleh penjualan bersih perseroan yang meningkat dari 424,92 juta dolar AS pada kuartal pertama 2006 menjadi sebesar 577,91 juta dolar AS pada kuartal pertama 2007. Dalam periode tersebut, laba operasional perseroan juga tampak terangkat dari semula hanya 44,10 juta dolar AS menjadi 112,24 juta dolar AS. Pada 2006, PT Bumi Resources Tbk berhasil membukukan laba bersih 222,30 juta dolar AS (11,46 dolar AS per saham), atau meningkat 80,35 persen dari 123,26 juta dolar AS (6,35 dolar AS per saham) pada 2005.

Teknikal:

Saham berkode BUMI ini tengah dalam tren naik sejak pertengahan September 2006 di level 710. Harga tertinggi dicapai pada pertengahan Maret 2006 di level Rp 980. Kemarin, saham ini ditutup turun Rp 50 menjadi Rp 2.500.

77

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2007

Kadin Minta Revisi, Pemerintah Belum Berniat Ubah DNI



ANTARAFOURI G

Dari kiri ke kanan: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menkominfo M Nuh, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Perdagangan Angestu, dan Ketua Kadin MS Hidayat bersiap rapat di Jakarta, Senin (16/7). Rapat bersama sejumlah pengusaha dalam dan luar negeri ini membahas daftar ne- estasi yang dikeluarkan pemerintah.

78

[JAKARTA] Pemerintah memastikan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 dan 77/2007 tidak akan dilakukan dalam waktu dekat ini walaupun usulan amandemen Perpres itu telah disampaikan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Pemerintah tetap akan menjalankan kedua Perpres tersebut seperti adanya saat ini. Namun membuka ruang dialog mengenai masalah lintas sektor yang dihadapi eksportir dan investor di Indonesia melalui kelompok kerja Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono mengatakan itu usai rapat dengan Kadin Indonesia dan juga perwakilan kadin asing, Senin (16/7). Hadir dalam rapat itu Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

"Kita tidak merevisi dalam waktu dekat, kita revisi kalau ada undang-undang yang baru. Perpres yang kita perbaiki adalah aturan pelaksanaannya. Dilusi juga akan kita perjelas," kata dia.

Menurut Boediono, pemerintah sudah menerima tanggapan dari Kadin dan perwakilan kadin asing atas daftar negatif investasi (DNI) yang dikeluarkan pemerintah. Teta-

pi, jawaban atas tanggapan itu belum dapat disampaikan saat ini.

Aturan pelaksanaannya, ujar Boediono, tergantung dari masing-masing sektor dan dapat berbentuk Surat Keputusan Bersama di tingkat menteri Teknis. Misalnya, di bidang telekomunikasi akan ada SKB bersama Menteri Perhubungan dengan Menteri Perdagangan. "Pada saat ini, Perpres (dijalankan) seperti apa adanya. Yang kita perjelas adalah pelaksanaannya," ujar Boediono.

Pemerintah juga menegaskan, peraturan itu tidak berlaku surat dan memberlakukan *grand fathering rule* bagi pelaku usaha maupun investor yang sudah menjalankan usahanya sebelum penerbitan Perpres. Artinya, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan komposisi pemegang saham dalam batasan persentase maksimum kepemilikan saham asing dan domestik yang telah disetujui sebelum Perpres dinyatakan tetap berlaku.

Komposisi Saham

Sementara itu, Mendag menjelaskan adanya perbedaan komposisi saham dalam DNI tersebut disesuaikan dengan UU yang terkait dengan sektor tersebut. Misalnya 20

persen kepemilikan saham di media hal itu berdasarkan UU Pers.

Kemudian, 80 persen kepemilikan saham di asuransi karena ada Peraturan Pemerintah yang berkaitan di sektor asuransi. Begitu juga di sektor finansial sebesar 80 persen. Sedangkan di sektor transportasi ada pembatasan hanya 49 kepemilikan saham sesuai dengan sejumlah UU di bidang transportasi yang sedang direvisi.

"Supaya domestik mayoritas. Sedangkan yang 50 persen dasar pemikirannya adanya kemitraan yang berimbang atau *equal partnership*. Sementara yang 55 hingga 65 atau 75 persen berdasarkan asumsi dari sektor yang dibahas dengan pelaku jadi sudah ada semacam ukuran kapasitas investor domestik," kata Mari.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Kadin MS Hidayat, mengharapkan agar DNI bisa segera direvisi dan disempurnakan. Tujuannya agar investasi makin marak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kadin bersama sekitar 100 asosiasi sudah menyusun 50 daftar pertanyaan dan usulan yang diajukan ke pemerintah agar DNI itu tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, sudah disepakati pula DNI harus memiliki penafsiran tunggal, mu-

dah diimplementasikan, memberikan kepastian di masa depan serta memiliki konsistensi dengan standar peraturan dan norma internasional.

"Mudah-mudahan dalam forum PEPI dengan Kadin bisa menjadi rujukan satu persatu untuk dibahas di masing-masing sektor supaya bisa sewaktu-waktu DNI itu lengkap dan komprehensif serta memenuhi kriteria yang dikehendaki dunia usaha maupun pemerintah," kata Hidayat.

Menurutnya, dunia usaha mengangkat tiga persoalan utama yang menjadi keprihatinan. *Pertama*, adanya wilayah abu-abu yang membutuhkan kejelasan informasi yang lebih tegas dan jernih.

Kedua, dunia usaha juga mempertanyakan dasar pemikiran yang melatarbelakangi keputusan penentuan kriteria berdasarkan DNI.

Ketiga, ketidakpastian mengenai proses perubahan dan transisi serta bagaimana perubahan DNI dapat diaplikasikan di masa depan. Hidayat mengatakan, apa yang terjadi bila sebuah perusahaan yang telah berdiri ingin melakukan ekspansi apakah harus mengikuti aturan DNI yang baru atau peraturan yang berlaku pada saat perusahaan tersebut berdiri. [L-10]

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN : 2

TAHUN 2007

SUCOFINDO BERBENAH JELANG IPO 2008

Saham Elnusa Dilepas Tahun Ini

Hans Geeno
NERACA

Jakarta - PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk melepaskan saham anak perusahaannya, PT Elnusa, sebanyak 20 persen melalui penawaran saham perdana (*initial public offering/IPO*) pada tahun 2007 ini.

Wakil Dirut Pertamina Iin Arifin Takhyan di Jakarta, Selasa 17/7, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Elnusa yang diselenggarakan Senin 16/7.

"Pemegang saham meminta direksi agar melakukan IPO Elnusa pada tahun ini," katanya. Menurut Iin, sebagian besar dana hasil IPO akan digunakan Elnusa mengembangkan bisnis jasa di sektor hulu minyak dan gas (migas). Namun, Elnusa masih belum menunjuk penjamin emisi (*underwriter*).

Kegiatan usaha Elnusa dibagi menjadi tiga bagian yakni jasa migas yang dijalankan sejumlah anak perusahaan yaitu Elnusa Geosains, Elnusa Drilling Services, Elnusa Oilfield Services dan Elnusa Petrofin.

Bidang usaha pengelo-

laan wilayah kerja migas dikerjakan Elnusa Bangkanai Energy Ltd., sedangkan bidang teknologi informasi dan komunikasi dikerjakan enam anak perusahaan; yakni Patra Nusa Data, ELMIK, Sigma Cipta Utama, Elnusa Rentrakom, Patra Telekomunikasi Indonesia, dan Infomesia Nusantara. Dari ketiga bidang usaha itu, pekerjaan jasa migas memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi Elnusa.

Saat ini, Elnusa dimiliki PT Pertamina 51,38 persen, PT Tri Daya Esta 46,44 persen, PT Danareksa Daiwa NIF Ventures 1,94 persen, karyawan Elnusa 0,15 persen, Yayasan Hari Tua 0,07 persen dan Koperasi Karyawan Elnusa 0,01 persen.

IPO Sucofindo

PT Sucofindo (Persero) segera berbenah diri mempersiapkan rencana pelepasan saham perdana (*Initial Public Offering/IPO*) tahun 2008.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Sucofindo Zafar D Idham usai seminar bertajuk 'Menjadi BUMN Yang Terpercaya Melalui Praktek GCG' yang diadakan di Manhattan

Hotel, Kuningan, Jakarta, Selasa 17/7.

"Secara formil belum diterima bentuk surat (untuk IPO), tapi saya sudah dapat indikasi dan tentunya kita harus berkonsultasi dengan pemegang saham dalam hal ini kementerian BUMN," kata Zafar.

Tentunya lanjut Zafar, akan dibahas mengenai strategi IPO. Seperti tujuan IPO apakah untuk pengumpulan dana, ataukah strategi-strategi lain.

"Mengingat perusahaan kita adalah perusahaan jasa, jadi tentunya barangkali ada legal yang harus kita penuhi sehingga kalau memang ini dilakukan harus tertata dengan baik," tuturnya.

Menurut Zafar, jika memang rencana untuk IPO di 2008 berjalan dengan lancar, rencananya dananya akan digunakan untuk pengembangan usaha dan memenuhi kewajiban-kewajiban.

Mengenai kinerja perseroan, Zafar mengatakan di tahun ini perseroan menargetkan pertumbuhan laba bersih sekitar 19 persen. "Tahun 2006 pendapatan kami Rp 870 miliar, sementara laba bersih sekitar Rp 18 miliar," jelasnya. ●